

Volume VIII, Nomor 1, Juli 2007

ISSN 1412 – 1557

# PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

---

*Andragogi Suatu Tinjauan Teoritik*

*Memahami Gagasan Pendidikan Multikultural*

*Partisipasi dan Motivasi Tokoh Masyarakat Terhadap Keberhasilan  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sumber Mulyo*

*Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional Berwawasan Budaya*

*Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) dan Implementasi dalam  
Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*

*Etika Guru Sekolah Dasar Profesional*

*Menciptakan Lingkungan Pembelajaran Efektif di Sekolah Dasar*

*Implementasi Bilingualisme dalam Pembelajaran Bahasa, Murtiningsih*

*Pentingnya Kerukunan Umat Beragama dalam Mewujudkan  
Masyarakat Sipil*



SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
CATUR SAKTI BANTUL

Pelangi Pendidikan	Vol. VIII	No. 01	Hlm. 1-80	Yogyakarta Juli 2007	ISSN 1412 – 1557
-----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	---------------------

# **PELANGI PENDIDIKAN**

**Majalah Ilmiah Kependidikan**

---

**Penerbit :**

SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
CATUR SAKTI

**Alamat :**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul, Yogyakarta 55714 Telp. (0274) 367612

**Pelindung :**

Ketua Yayasan Catur Sakti

**Ketua/Penanggungjawab :**

Ag. Wahana

**Ketua Penyunting/Redaksi :**

Sumadi

**Sekretaris Penyunting :**

Sukardi, B. Suryosubroto

**Anggota :**

Djuwalman, Ardi Ris, Mulyono, Bayudi, Edi S., Farida, Mardi Ak.

**Lay Out :**

Kris BR

**Administrasi :**

Maryanto, Edi K., Tukul PS.

**ISSN :**

1412-1557

No. 18.389/IV.3.03/ISSN/2001

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau ringkasan hasil penelitian dari para pembaca. Redaksi berhak menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa mengubah maksud dan isi. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.



# **PELANGI PENDIDIKAN**

Majalah Ilmiah Kependidikan

---

## **DAFTAR ISI**

Andragogi Suatu Tinjauan Teoritik, Djuwalman	1 – 9
Memahami Gagasan Pendidikan Multikultural, Achmad Daldiri	10 – 16
Partisipasi dan Motivasi Tokoh Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sumber Mulyo, Dra. Hj. Lue, MM	17 - 24
Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional Berwawasan Budaya, Sukadari	25 – 34
Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) dan Implementasi dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, Hidayati	35 – 44
Etika Guru Sekolah Dasar Profesional, Dwi Siswoyo	45 – 51
Menciptakan Lingkungan Pembelajaran Efektif di Sekolah Dasar, Ernawati Budi Listyani	52 – 58
Implementasi Bilingualisme dalam Pembelajaran Bahasa, Murtiningsih,	59 – 68
Pentingnya Kerukunan Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil, Sigit Dwi Kusrahmadi	69 – 80

## MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL BERWAWASAN BUDAYA

Oleh : Sukadari (STKIP Catur Sakti)

### Latar Belakang Masalah

Kebudayaan telah menjadi kompas dalam perjalanan hidup manusia sehingga mampu membentuk keyakinan untuk dijadikan pedoman dalam tingkah laku. Pandangan semacam itu menyebabkan penulis merunut keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolis individu dan kelompok, terutama untuk melihat proses pewarisan nilai itu terjadi, seperti yang dibayangkan Clifford Geertz bahwa kebudayaan itu “merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjadi secara menyeluruh dari simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis” (Geertz, 1973:89). Pada bagian selanjutnya Geertz juga mengatakan bahwa kebudayaan itu “merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan” (Geertz, 1973:90).

Hal di atas memperjelas bahwa menjadikan manusia yang berbudaya melalui proses dari waktu ke waktu. Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk memupuk, mengembangkan maupun melestarikan budaya-budaya yang dipandang perlu, dapat dijadikan pijakan suatu bangsa dalam mempertahankan citra diri yang mampu mengangkat derajat yang bermartabat.

Suatu kemustahilan bila suatu bangsa dapat mewujudkan tujuan pendidikan tanpa mempedulikan budaya yang ada. Banyaknya anak bangsa yang akhir-akhir ini mulai luntur mencintai kebudayaan sendiri dan cenderung budaya barat sebagai acuan dalam bertingkah laku sungguh sangat memprihatinkan. Dalam kajian ini penulis mencoba menelusuri perkembangan budaya sebelum dan sesudah kemerdekaan dan juga memahami tentang sistem pendidikan di Indonesia, karena sekolah merupakan bagian dari budaya bangsa dan sekaligus peran strategis dalam melestarikan budaya itu sendiri.

Istilah kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik yang jelas, seperti halnya budaya Jawa yang menunjuk pada suatu tradisi yang hidup di pulau Jawa. Demikian pula halnya budaya Bali yang secara langsung membawa pikiran kita ke Pulau Dewata. Batas-batas fisik telah



menjadi dasar pendefinisian keberadaan suatu kebudayaan, khususnya pada saat sesuatu yang bersifat fisik masih dianggap paling penting dan menentukan.

Tujuan pendidikan berwawasan budaya sangat penting yaitu kebudayaan harus berdasarkan azas-azas pendidikan nasional yang demokratis, karena budaya Indonesia merupakan milik rakyat dalam arti kebudayaan rakyat sebagai manifestasi daripada hidup rakyat pada umumnya. Budaya dapat menumbuhkan kesadaran hidup batin dan pembentukan keyakinan serta pembentukan watak sehingga diharapkan pendidikan pada umumnya dapat mengembangkan potensi anak secara maksimum tanpa mengesampingkan pembentukan karakter dan sikap yang terpuji.

Budaya tidak senantiasa identik dengan kesenian saja, tetapi pengertian budaya sangat kompleks dan luas. Dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada BAB III pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", dan selanjutnya dalam pasal yang sama pada ayat 3 berbunyi "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat."

Kedua contoh isi pada pasal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa semua unsur budaya yang ada di Indonesia diakui dan dihargai kemajemukannya berlangsung sepanjang hayat, artinya budaya manusia Indonesia tidak ada batas waktu untuk mempelajari dan melakukannya sehingga prinsip dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional relevan dengan budaya bangsa.

### **Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka**

Munculnya kongres kebudayaan sebelum Indonesia merdeka disebabkan kondisi masyarakat pendukung kebudayaan kehilangan segala kebebasan karena sedang dijajah Belanda. Kebebasan itu kembali didapat setelah bangsa Indonesia memproklamisikan diri menjadi bangsa merdeka.

Sebelum Indonesia merdeka penataan kehidupan masyarakat diatur dalam sistem kerajaan yang sering disebut sosok budaya "*feodal aristokratik*" yaitu melahirkan suatu sintesa budaya "*adi luhung*" yang indah dan luhur. Masyarakat kraton memiliki beberapa ciri, yaitu setengah terbuka, bersifat tradisional, konservatif, peradaban bersifat inovatif raja

dianggap sakral magis, demikian pula benda-benda miliknya; mengutamakan status, senioritas darah/kebangsawanan dan terdapatnya hirarki yang menyusup di seluruh bagian kehidupan” (Darsiti Soeratman, 2000:90).

Kongres kebudayaan pertama yang diselenggarakan tahun 1918 adalah peristiwa budaya bersejarah karena merupakan peristiwa lahirnya kesadaran tentang masa depan budaya bangsa, di samping lahirnya kesadaran berbangsa. Bila penyelenggaraan kongres itu dikaitkan dengan peristiwa sejarah bangsa berarti tepat berada di tengah-tengah dua peristiwa bersejarah bagi lahirnya bangsa Indonesia.

Tiga tahun setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 20 – 24 Agustus 1948 ditetapkan sebagai kongres kebudayaan yang pertama.., kebudayaan saat itu sebagai tenaga penggerak segenap usaha perjuangan tentu tidak terbatas pada kesenian saja tetapi merupakan pengisi jiwa dan kekuatan baru bagi bangsa kita untuk meneruskan perjuangan dalam masa revolusi itu.

Rumusan hasil kongres kebudayaan setelah kemerdekaan ternyata besar pengaruhnya dalam masyarakat sekolah (baca: pendidikan) yang inti dari hasil kongres tahun 1954 adalah sebagai berikut :

1. Agar pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah dapat berjalan sebaik-baiknya dan mampu mengembangkan daya kreasi serta beraskan pendidikan nasional yang demokratis.
2. Untuk menjamin pertumbuhan yang harmonis sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan kebudayaan haruslah diadakan sistem pendidikan sehingga pendidikan kesenian dan pandangan hidup mendapat tempat yang semestinya di samping ilmu pengetahuan dan kecakapan.
3. Badan-badan kepanduan dan organisasi-organisasi pelajar/siswa merupakan tempat perkembangan kebudayaan yang penting.

### **Tujuan Pendidikan**

Sejak diundangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 1950 lalu diperbaharui UU No. 2 Tahun 1989 sampai disempurnakan lagi Nomor 20 Tahun 2003. Substansi dari tujuan pendidikan tak jauh berbeda. Kalau dicermati kalimat-kalimat serta penjajarannya paling rinci adalah Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.



Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Orientasi dari uraian tujuan pendidikan adalah peserta didik mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menjadi insan yang berakhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk menjadi insan yang sehat jasmani maupun rokhani, sanggup menjadi manusia berilmu dan memiliki keahlian dengan sabar mengembangkan kreatifitas untuk mewujudkan karya nyata secara mandiri, tetapi tetap memiliki sikap demokratis dan bertanggungjawab.

Pada Undang-undang Sisdiknas BAB III pasal 4 tentang penyelenggaraannya mempunyai prinsip sebagai berikut :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun keimanan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Uraian Bab III pasal 4 dan ayat-ayat tersebut memperjelas tentang tujuan pendidikan, walaupun di depan sudah dijelaskan bahwa munculnya tujuan pendidikan nasional diilhami dari perkembangan kebudayaan di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.

Apabila kita lihat, tujuan tersebut di atas memiliki pengertian bahwa pendidikan memberi makna mengembangkan potensi secara optimal melalui proses belajar mengajar. Karena ada keyakinan bahwa di samping bakat yang dibawa sejak lahir, fakta menunjukkan lingkungan melalui pendidikan juga ikut menentukan berkembangnya potensi anak.



Masalah tersebut di atas menguatkan adanya aliran konvergensi yang memadukan antara nativisme yaitu bakat atau kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dan faktor genetika atau keturunan dari orang tua anak juga kodrat anak serta empirisme yang mana lingkungan sangat menentukan berkembangnya anak dalam segala hal. Menurut teori konvergensi ini pendidikan di masyarakat, keluarga, lebih-lebih di sekolah memiliki peran dominan dalam perkembangan anak. Teori ini seperti teori tabularasa yang menyatakan bahwa anak lahir seperti kertas putih bersih tergantung lingkungan yang mewarnai. Oleh karena itu, kedua teori ini dapat dikeluarkan, karena kenyataannya memang demikian.

### **Dampak Teknologi Terhadap Budaya**

Perkembangan teknologi yang kian maju mempunyai dampak yang luas terhadap tata kehidupan di tengah masyarakat mulai dari anak kecil, masa sekolah, masa dewasa, sampai orang tua akan merasakan dampaknya.

Kehadiran TV maupun internet merupakan tanda perubahan peradaban dari suatu ujung garis *kontinuen* budaya ke ujung garis *kontinuen* yang lain. Pada saat TV mulai menggantikan institusi keluarga, teman, dan komunitas sebagai titik pusat peradaban, titik interaksi dan pembentukan nilai berpusat pada TV. Peran orang tua bergeser pada saat remote kontrol berada di tangan penonton yang kemudian mengendalikan serangkaian nilai dengan cara menghadirkan suatu yang dia pilih dalam proses konsumsi waktu luang.

TV telah mengaburkan batas-batas fisik dan budaya sehingga menciptakan “deteritoalisasi” suatu dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Untuk itu ada 3 ruang yang dapat dianalisis, sebagai bagian dari titik balik peradaban yang diakibatkan oleh kehadiran tabung TV yang menjadi jendela dunia tersebut.

#### **1. Dominasi Komoditi Simbolik**

Program TV, internet, maupun HP secara langsung mentransformasikan sistem nilai yang berlaku, batas-batas usia menjadi kurang begitu jelas. Selera kaum muda telah mengaburkan garis pembatas usia seseorang. Proses konsumsi yang ditunjukkan oleh TV bukan terikat pada kebutuhan, melainkan terikat pada kontrol sosial. Kecenderungan dominasi simbolik ini dapat dilihat pada tiga proses yaitu :

- a. Proses transformasi masyarakat dari penekanan kelas ke status dimana status sosial seseorang menjadi bagian yang sangat penting dari proses konsumsi.
- b. Proses pencarian nilai tambah untuk menunjukkan perbedaan seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain. Idiologi di sini perbedaannya menjadi prinsip yang sangat kuat yang menyebabkan proses sosial bukan lagi merupakan proses homogenisasi tetapi menjadi proses heterogenisasi.
- c. Nilai-nilai simbolis yang dibangun dalam wacana TV juga cenderung mengarah pada proses pencarian nilai otentik dalam rangka menunjukkan keabadian keaslian atau kebenaran.

## 2. Konsumsi Etika dan Estetika

Model kehidupan yang dihadirkan dan diproyeksikan oleh TV atau internet menjadi model realitas sosial yang cenderung diikuti akibat *general hysteria* (seruan umum) yang melanda masyarakat modern. Kehidupan sebagai proses etis tampaknya mengalami pergeseran secara mendasar sejalan dengan dominannya nilai simbolik dalam proses kehidupan sosial yang menunjukkan adanya kecenderungan penekanan pada aspek material. Kecenderungan estetisasi ini dapat dilihat pada tiga kecenderungan, yaitu :

- a. Pada sentuhan gaya (*style*) yang diberikan pada berbagai praktek dan produk.
  - b. Proses privatisasi yang terjadi secara meluas, dimana gaya sesungguhnya berorientasi pada seni yang baik tentu saja tidak ada kembarannya. Kecenderungan ini menghasilkan suatu penyakit dimana etika sosial digantikan dengan etika individual, kecenderungan kehilangan sensitifitas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan orang lain.
  - c. Kecenderungan privatisasi tersebut tetap menyebabkan seseorang sangat sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut keberadaan dirinya yang tampak dari kecenderungan mudah tersinggung dimana fungsi kontrol menjadi menghilang.
- ## 3. Sistem Referensi Tradisional

Kenyataan kehidupan sekarang ini sistem nilai tradisional mulai digantikan oleh sistem nilai modern sehingga sistem referensi tidak lagi berkiblat pada tradisi, tetapi pada nilai modernitas dengan logika berfikir yang berbeda. Tradisi dalam TV menjadi komoditi yang

estetis sehingga etika suatu tradisi tidak tergambarkan. Wayang dipahami sebagai hiburan atau sebagai *emancipatory politic* orang modern (yang dulunya *ndeso*) sehingga menghilangkan nilai filosofis dan etika suatu tradisi. Kecenderungan itu dapat terjadi karena tiga hal yang saling terkait yaitu :

- a. Proses transformasi keluarga tradisional ke modern dengan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang berubah.
- b. Berubahnya tata nilai dalam masyarakat dimana kehidupan bukan hanya sekedar melanjutkan naluri masa lalu tetapi telah menjadi arena negosiasi berbagai tata nilai yang tidak hanya lokal dan nasional, tetapi juga global sifatnya.
- c. Kecenderungan ini terjadi sejalan dengan melemahnya kebudayaan sebagai pengendali dan pewaris sistem nilai. Pusat-pusat kebudayaan, baik itu diwakili kraton atau institusi adat dan keagamaan, telah kehilangan peran dan pengaruh di dalam pencantuman nilai, dan lebih memprihatinkan lagi sudah banyak melanda di dunia pendidikan atau sekolah-sekolah, baik di kota maupun di desa.

### **Bhinneka Tunggal Ika dalam Keragaman Budaya**

Upaya untuk mengikat pluralisme yang ada maka dengan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat diwujudkan, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya ini telah melahirkan akibat-akibat yang buruk lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan pernyataan yang jelas untuk menunjukkan keragaman budayanya yang mencakup bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi maupun sistem politik yang dipraktekkan pada tingkat lokal.

Rakyat dalam hal ini telah dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukkan demi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan sebagai basis kekuatan sosial, bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai suatu kesalahan.

“Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di daerah-daerah telah dilakukan antara lain dengan menyudutkan kebudayaan-kebudayaan tersebut sebagai terbelakang dan harus diindonesiakan. Peng-Indonesia-an dilakukan dengan cara Penataran P4 yang dilakukan oleh Departemen Sosial RI” (Suparlan, 2000:44).



Penataan keagamaan merupakan contoh yang signifikan untuk memperlihatkan bagaimana visi pemerintah tentang pluralisme budaya. Kesalahan yang fatal telah dilakukan akibat kesalahpahaman dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan dari orde lama ke orde baru.

Proses nasionalisasi yang terjadi telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang beragam, baik budaya materi, penataan sosial, maupun ideologi dan nilai-nilai yang mengandung kearifan lokal.

### **Tujuan Pendidikan Berwawasan Budaya**

Tujuan pendidikan di Indonesia sekarang ini tentu sudah jauh berbeda dengan tujuan pendidikan di masa penjajahan Belanda. Undang-undang pendidikan dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Sistem pendidikan yang terjadi pada zaman penjajahan selalu bermuatan politik atau kepentingan, sedangkan munculnya undang-undang setelah kemerdekaan berwawasan kebangsaan dan seoptimal mungkin tidak bertentangan dengan kultur budaya sendiri.

Sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia harus selalu meniruti dengan menyesuaikan kehidupan yang bersusila atau berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Kesusilaan bukan hanya berarti bertingkah laku sopan-santun, lemah lembut, kuat, dan berbakti pada orang tua saja, melainkan lebih luas dari itu, yaitu harus menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Banyak orang menafsirkan bahwa cakap sama dengan pandai yang berarti banyak hafal tentang pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan yang dimaksud cakap jika orang itu pandai menggunakan daya akal dan pikirannya dengan baik sehingga pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan daya akal dan pikiran dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Demikian pula kecakapan itu tidak akan membuahkan hasil yang baik jika tidak disertai syarat kesusilaan. Masyarakat kita memerlukan orang yang menunaikan tugasnya secara cakap dengan bersendikan kesusilaan. Kesusilaan dapat diwujudkan dengan baik melalui proses budaya yang baik juga.

Di samping hal tersebut di atas, harus diusahakan mendidik warga negara menjadi warga negara sejati. Tiap-tiap warga negara harus turut

bertanggungjawab atas kehidupan di tengah masyarakat dan pemerintahan negaranya. Tiap warga negara hendaklah tahu kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang menuju demokrasi.

Akhir-akhir ini budaya kekerasan dan main hakim sendiri makin merebak. Hal itu dapat mengakibatkan krisis di Indonesia. Beberapa hal penting yang patut kita ajukan yaitu :

1. Terdapat kecenderungan yang meluas yang diperlihatkan masyarakat untuk keluar dari sistem dan struktur dengan berbagai bentuk resistensi dalam berbagai kehidupan sosial. Kondisi ini tentu sangat berbahaya karena kekuatan massa yang begitu besar tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang positif.
2. Terdapat kecenderungan munculnya "*dual sistem*" dalam arti luas dimana keabsahan dan efektivitas sistem yang sesuai mengalami gugatan dari suatu sistem yang diciptakan masyarakat.
3. Budaya kekerasan harus dihentikan karena merupakan sikap dan moral tercermin, memburuknya etika sosial pada berbagai tingkat dan kelompok sosial.

Berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berwawasan budaya harus diupayakan seoptimal mungkin dan semua lapisan harus ikut bertanggung jawab mengantisipasi budaya baru yang kurang relevan dengan pribadi bangsa kita. Melestarikan budaya sendiri yang sesuai dengan tata kehidupan bermasyarakat kita patut dilestarikan.

Dengan mempertahankan budaya sendiri bukan berarti menutup mata dari budaya asing. Munculnya teknologi canggih memang dapat mengacau tata kehidupan suatu bangsa, apalagi masuk di wilayah pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, segala macam budaya yang menopang dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus didukung sementara budaya baru yang datang harus selektif untuk menerimanya, sehingga tujuan pendidikan yang berwawasan budaya dapat terwujud tanpa kehilangan pribadi bangsa.

## Kesimpulan

Tujuan pendidikan yang berwawasan budaya dapat direalisasikan apabila semua komponen bangsa peduli dan mau melakukan sesuai dengan etika moral yang bertanggungjawab. Perkembangan zaman telah mengancam sendi-sendi kehidupan apabila tidak selektif menerima budaya baru.

Pendidikan yang berbudaya tentu diharapkan mampu menjadikan suatu bangsa tidak akan kehilangan jati diri dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Akibat dari sebaik apapun kalau para pelaku pendidikan tidak menjalankan dengan penuh tanggungjawab dari program yang ada maka semua akan sia-sia.

Mengikuti perkembangan dunia yang semakin kompleks harus selektif, kemajuan teknologi dan aplikasinya tak sesuai dengan budaya sendiri akan menjadi malapetaka bagi generasi mendatang. Mengakses dari luar memang perlu tetapi harus selaras dengan keadaan lingkungan kita agar tujuan pendidikan yang berwawasan budaya tak tergelincir dengan era globalisasi.

### Daftar Pustaka

- Darsiti Soeratman, (2000), *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta*, Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia.
- Geertz, Clifford, (1973), *Interpretation of Cultures*, New York : Basic Books.
- \_\_\_\_\_, (1983). *Local Knowledge*, New York : Basic Books.
- Ngalim Purwanto, (1984), *Psikologi Pendidikan*, Bandung : CV. Penerbit Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_, (1972), *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Paket Pengajaran pada Proyek Kerjasama PT Stanvac. Indonesia.
- NN, (2003), *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003*, Bandung : Citra Umbata.
- Sumartana, (2001), *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Interfidei.